

BAB 3

Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini akan menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk satu periode mendatang. Pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya menggambarkan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kondisi neraca daerah periode sebelumnya.

Gambaran tersebut selanjutnya berguna untuk menentukan kerangka pendanaan yang meliputi pengidentifikasian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja serta pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan terutama untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah lima tahun kedepan. Kerangka pendanaan juga mencakup potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah digambarkan melalui analisis kinerja pelaksanaan realisasi anggaran daerah dan neraca daerah berdasarkan pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun terakhir.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Perkembangan Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, komponen pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2013-2017, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas terhadap pencapaian rencana pendapatan masih cukup baik walaupun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kebijakan nasional terkait dana perimbangan.

Tabel 3.1.
Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Rencana Pendapatan (Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Rupiah)	% Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Pendapatan
2013	11.940.096.024.641	11.631.697.051.830	97,42%
2014	11.192.326.880.287	11.287.300.941.021	100,85%
2015	10.497.631.453.406	9.464.926.705.876	90,16%
2016	7.762.674.455.113	7.987.877.780.773	102,90%
2017	8.223.730.774.720	8.154.749.005.918	99,16%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama penyusun pendapatan daerah. PAD terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 42,46 persen. Meskipun demikian, nilai absolut pendapatan pajak daerah setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan minus 12,85 persen per tahun.

Komponen terbesar penyumbang pajak daerah berasal dari pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Namun demikian terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan turunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor karena adanya penurunan daya beli dari masyarakat.

b. Dana Perimbangan

Pendapatan daerah dalam APBD yang berasal dari Dana Perimbangan dan transfer lainnya setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. DAK mengalami peningkatan yang signifikan semenjak tahun 2014. Demikian pula dengan DAU mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun

2016. Sementara itu, meskipun sebagai sumber pendapatan terbesar, besaran DBH cenderung menurun.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah pada komponen ini paling besar berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Meskipun demikian, rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 2,53 persen.

Selama periode tahun 2013-2017, Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari tahun 2013 Rp 410,67 Milyar menjadi Rp 37,26 Milyar di tahun 2017. Hal ini disebabkan karena Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terus mengalami penurunan dari Rp 394,6 Milyar di tahun 2013 menjadi Rp 7,5 Milyar pada tahun 2017. Pada tahun 2018, tidak ada alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Kalimantan Timur.

2. Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Melalui analisis ini dapat terlihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah pada periode tahun 2013-2017 digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang.

Tabel 3.2. Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	% Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja
2013	15.139.000.000.000	13.780.244.907.476	91,02%
2014	12.217.683.000.000	11.274.631.837.034	92,28%
2015	11.484.260.000.000	10.205.342.292.212	88,86%
2016	7.976.359.000.000	7.601.242.338.859	95,30%

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	% Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja
2017	8.223.730.774.720	8.101.145.367.965	98,51%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun. Analisis pertumbuhan merupakan salah satu analisis lain dalam melihat kinerja belanja daerah selain menggunakan analisis efektifitas.

Analisis selanjutnya dalam melihat kinerja Belanja Daerah adalah analisis proporsi realisasi terhadap perencanaan. Rata-rata realisasi belanja langsung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja tak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan belanja bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2013-2017 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel 3.3. Perkembangan Pembiayaan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

NO	TAHUN	URAIAN PEMBIAYAAN		PEMBIAYAAN NETTO
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1.	2013	3.198.903.975.359,34	-	3.198.903.975.359,34
2.	2014	1.050.356.119.713,24	25.000.000.000,00	1.025.356.119.713,24
3.	2015	1.036.628.546.594,01	50.000.000.000,00	986.628.546.594,01
4.	2016	226.684.544.888,84	-	226.684.544.888,84
5.	2017	611.118.124.746,55	-	611.118.124.746,55

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen yaitu *pertama* penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, *kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Pada tahun 2013 – 2017, pembiayaan penerimaan daerah hanya bergantung pada SiLPA. SiLPA terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp 226,68 Milyar sedangkan SiLPA tertinggi yakni sebesar Rp 3,2 Trilyun dialami pada tahun 2013.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	11.940.096.024.641	11.192.326.880.287	10.497.631.453.406	7.762.674.455.113	8.223.730.774.720	-3,19%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	5.543.616.578.000	5.771.201.825.750	5.095.145.980.601	3.921.364.868.077	4.167.589.517.079	-0,26%
1.1.1.	Pajak daerah	4.929.791.598.767	5.429.125.998.687	3.753.718.935.816	3.127.250.928.433	3.505.578.072.171	-2,13%
1.1.2.	Retribusi daerah	33.676.707.133	15.494.252.850	14.722.788.428	19.435.790.560	16.659.010.037	-4,29%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	291.684.072.010	310.199.925.478	230.116.057.795	167.385.377.651	208.807.497.552	-5,63%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	630.109.625.674	909.765.846.475	951.602.831.867	717.442.609.764	857.708.316.470	9,61%
1.2.	Dana Perimbangan	5.973.586.166.641	5.053.998.624.537	4.918.899.806.705	3.813.127.539.436	4.024.646.840.474	-5,01%
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	5.272.171.973.247	4.194.970.542.625	3.805.373.705.410	2.844.821.387.413	1.710.695.086.821	-9,28%
1.2.2.	Dana alokasi umum	55.539.336.500	57.312.515.000	0	80.402.179.000	714.906.576.000	139,95%
1.2.3.	Dana alokasi khusus	8.047.840.000	1.383.900.000	218.651.350.000	1.047.628.487.000	1.143.558.722.000.000	24990,59%
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	422.893.280.000	367.126.430.000	483.585.666.100	28.182.047.600	31.494.417.167	-9,12%
1.3.1	Hibah	16.045.173.000	16.781.978.000	11.404.893.000	9.736.113.000	10.437.936.000	-3,46%
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	394.630.725.500	352.611.956.905	483.585.666.100	5.000.000.000	7.500.000.000	-24,49%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0	0	15.048.587.875	13,21%
2	BELANJA	15.139.000.000.000,00	12.217.683.000.000,00	10.967.068.904.744,60	7.989.359.000.000,00	8.834.897.375.000,00	-6,29%

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1	Belanja Tidak Langsung	7.589.788.098.568,00	6.598.286.393.088,30	5.947.158.306.899,96	4.197.167.944.503,67	5.570.709.846.709,00	-2,73%
2.1.1	Belanja Pegawai	933.282.282.068,00	1.027.784.762.088,30	514.399.254.869,71	991.505.508.003,67	1.698.837.530.019,00	24,95%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	1.617.958.784.500,00	946.891.710.000,00	977.532.900.000,00	849.120.600.000,00	1.035.431.514.000,00	-5,07%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	3.870.100.000,00	5.010.000.000,00	3,15%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2.759.134.532.000,00	2.576.755.696.000,00	2.874.912.719.218,25	1.478.522.500.000,00	2.104.010.195.500,00	2,66%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan & Politik	2.254.122.500.000,00	2.031.354.225.000,00	1.556.813.432.812,00	861.149.236.500,00	721.120.607.190,00	-19,58%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	19.790.000.000,00	10.000.000.000,00	18.000.000.000,00	13.000.000.000,00	6.300.000.000,00	-9,65%
2.2	Belanja Langsung	7.549.211.901.432,00	5.619.396.606.911,73	5.019.910.597.844,64	3.792.191.055.496,33	3.264.187.528.291,00	-9,03%
2.2.1	Belanja Pegawai	609.529.516.215,33	489.298.650.271,25	514.399.254.869,71	450.048.961.767,00	243.801.648.092,00	-14,15%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.747.919.262.071	2.430.984.550.539,79	2.158.118.306.082,14	1.695.886.958.784,33	2.001.134.625.074,00	-6,19%
2.2.3	Belanja Modal	4.191.763.123.145	2.699.113.406.100,69	2.347.393.036.892,79	1.646.255.134.945,00	1.019.251.255.125,00	-2,68%
3	PEMBIAYAAN	3.198.903.975.359,34	1.025.356.119.713,24	986.628.546.594,01	226.684.544.887,84	611.166.600.279,55	1,76%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.887,84	611.166.600.279,55	2,31%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0	0	0,00%

3.1.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan pemerintah daerah adalah neraca daerah. Neraca daerah terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset dilihat dari nilai uang yang terkandung di dalamnya, serta manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari adanya aset. Utang berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan berdasarkan sebab lainnya yang sah. Utang dalam analisis neraca dilihat dari utang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Selisih antara nilai aset dan utang didalam neraca daerah disebut sebagai ekuitas dana. Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di neraca pemerintah daerah berasal dari perolehan sejak Pemerintah Daerah tersebut berdiri. Oleh karena itu, untuk keperluan penyusunan neraca pertama kali, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan suatu pendekatan tertentu dan melakukan inventarisasi terhadap aset dan kewajibannya. Keandalan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca awal sangat penting dalam membangun sistem akuntansi pemerintah daerah, karena jumlah-jumlah yang disajikan dalam neraca awal akan menjadi saldo awal, yang akan terus terbawa dalam sistem akuntansi berikutnya. Kondisi neraca daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2015 adalah sebagai berikut.

Rata-rata pertumbuhan paling tinggi selama 5 tahun adalah pada komponen aset lainnya, yakni sebesar 88,86 persen. Aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Komponen aset dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah aset tetap, sebesar 87,64 persen. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; serta konstruksi dalam pengerjaan. Pertumbuhan yang tinggi dalam aset tetap ini dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di bidang sarana dan prasarana wilayah. Pertumbuhan komponen aset daerah yang tidak signifikan adalah aset lancar sebesar 2,84 persen dan investasi jangka panjang sebesar 1,8 persen. Rata-rata pertumbuhan aset daerah secara keseluruhan adalah 1,91persen. Pertumbuhan aset tersebut jauh lebih rendah jika dibanding pertumbuhan utang atau kewajiban. Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki kewajiban jangka pendek, namun rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah 24,66 persen. Ada rata-rata pertumbuhan ekuitas dana sebagai selisih antara aset dan kewajiban, yakni sebesar 1,41 persen.

Tabel 3.5.
Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013 (RP)	2014 (RP)	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)	PERTUMBUHAN (%)
1	Aset						
1.1.	Aset lancar	3,189,372,457,985.78	3,515,289,699,289.26	2,794,480,674,938.52	3,339,405,804,164.78	3,411,721,430,648.76	2.84
1.2.	Investasi jangka panjang	2,307,568,136,886	2,179,088,079,707	2,118,541,287,430	2,277,501,235,381	2,460,721,222,689.26	1.8
1.3.	Aset tetap	21,996,096,815,949.40	24,220,982,878,331.00	18,382,849,193,614.30	17,175,963,871,129.80	21,357,892,468,817.10	87.64
1.4.	Aset lainnya	151,881,580,658.91	174,339,515,972.00	132,704,136,253.30	320,313,481,494.34	1,035,220,371,759.79	88.86
	Jumlah aset daerah	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.40	23,113,184,392,170.20	28,265,555,493,914.90	1.91
2	Kewajiban						
	Kewajiban jangka pendek	632,278,528,956.51	913,791,245,661.67	468,763,491,805.24	716,158,960,129.10	1,074,749,726,990.98	24.66
3	Ekuitas dana	27,012,640,462,523.70	29,175,908,927,637.40	22,959,811,800,431.10	22,397,025,432,041.10	27,190,804,766,923.90	1.41
	Jumlah kewajiban dan ekuitas dana	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.30	23,113,184,392,170.20	28,265,554,493,914.90	1.91

Sumber: Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Pertumbuhan berbagai komponen neraca daerah tersebut, kemudian dianalisis secara lebih mendalam melalui perhitungan tiga rasio. Analisis neraca daerah yang *pertama* adalah menggunakan rasio likuiditas. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio quick yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Adapun jumlah persediaan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.6 Jumlah Persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	PERTUMB. (%)
Persediaan	1,782,357,165,828	1,997,096,484,129	2,057,431,888,726	2,204,883,737,445	2,513,224,064,671	9.05

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

**Tabel 3.7
Rasio Likuiditas Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017**

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	5.04	3.84	5.96	4.66	3.17	4.53
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	2.22	1.66	1.57	1.58	0.83	1.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas melalui perhitungan rasio lancar dan rasio quick, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, meskipun dengan nilai yang tidak cukup besar. Rasio lancar memiliki rata-rata rasio sebesar 4,53, sedangkan rasio quick memiliki rata-rata 1,57. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kewajiban jangka

pendek yang selalu ada setiap tahun dan memiliki rata-rata pertumbuhan cukup besar, yakni 24,66 persen. Adapun kondisi rasio quick yang lebih kecil dibanding dengan rasio lancar karena dipengaruhi oleh adanya pengurangan aset lancar oleh persediaan. Kondisi tidak signifikannya nilai rasio lancar maupun quick perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kapasitas keuangan daerah, serta adanya kebijakan pengambilan kewajiban jangka pendek perlu memiliki langkah cermat.

Analisis neraca daerah yang *kedua* dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dilakukan melalui perhitungan rasio total hutang terhadap total aset, serta rasio hutang terhadap modal. Perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.8

Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0.022	0.0303	0.020	0.0309	0.038	0.028
2	Rasio hutang terhadap modal	0.023	0.0313	0.020	0.0319	0.039	0.029

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kondisi yang *solvable*. Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan rasio likuiditas, dimana semakin kecil rasio solvabilitas maka kondisinya semakin baik atau *solvable*. Rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal memiliki kondisi yang fluktuatif selama 2013 hingga 2017, sedangkan rata-rata nilai rasio keduanya hampir sama, yakni 0,028 pada rasio total hutang terhadap total aset, dan 0,029 pada rasio hutang terhadap modal. Perhitungan kedua rasio tersebut hanya menggunakan kewajiban jangka pendek, karena Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur tidak memiliki kewajiban jangka panjang selama tahun 2013 hingga 2017.

Analisis neraca daerah yang *ketiga* menggunakan perhitungan rasio aktivitas, yaitu melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas terdiri dari rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang dihitung dari 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Guna memperoleh nilai perputaran piutang maka pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, sedangkan rata-rata piutang diperoleh dari penjumlahan saldo awal piutang dengan saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Adapun nilai piutang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.9 Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	PERTUMB. (%)
Piutang	709,122,636,012	883,288,619,506	671,448,413,308	755,022,737,028	634,847,129,148	-20.57%

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Rasio aktivitas juga dihitung melalui rata-rata umur persediaan, yaitu berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan, karena dana persediaan dapat digunakan untuk pelayanan publik jika diperlukan. Rata-rata umur persediaan dihitung melalui 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk memperoleh nilai perputaran persediaan, maka nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata nilai persediaan, dimana rata-rata nilai persediaan diperoleh melalui penjumlahan antara saldo awal dan akhir persediaan kemudian dibagi dua.

Tabel 3.10 Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
1	Rata-rata Umur Piutang	21.29	25.75	29.97	32.59	31.09	28.14
2	Rata-rata Umur Persediaan	282.42	345.38	359.65	352.80	342.61	336.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengubah piutang menjadi kas cukup baik, yakni rata-rata selama 28,14 atau kurang dari satu bulan. Perhitungan yang berbeda terdapat pada rata-rata umur persediaan, yakni jika umur piutang lebih pendek atau sedikit maka lebih baik, sedangkan umur persediaan semakin lama, maka semakin baik. Pada konteks ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki rata-rata umur persediaan yang baik, yakni memiliki rata-rata 336,57 atau hampir selama satu tahun. Kondisi ini menjadikan keuangan pemerintah daerah yang relatif stabil, karena dana persediaan tidak dicairkan secara cepat atau relatif tidak ada kebutuhan mendesak untuk menggunakan dana persediaan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi. Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk

mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD yang sebagian besar hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya operasional lainnya, maka kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017 adalah 53,73 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

**Tabel 3.11 Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Tahun	PAD (Rupiah)	Total Pendapatan	DOF (Persen)
2013	5.885.262.003.582,88	11.631.697.051.829,90	50,60%
2014	6.664.586.023.490,97	11.287.300.941.021,00	59,04%
2015	4.950.160.613.906,01	9.464.926.705.876,01	52,30%
2016	4.031.514.706.408,00	7.987.877.780.773,00	50,46%
2017	4.588.752.896.230,47	8.154.749.005.918,47	56,25%
Rata-rata	5.224.055.248.723,67	9.705.310.297.083,67	53,73%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan tren yang fluktuatif. Berikut adalah analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

Tabel 3.12.
Proporsi Belanja Pemenuh Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (a) / (b) x 100%
		(a)	(b)	
1	2013	1,542,811,798,283.33	15,139,000,000,000.00	10.19%
2	2014	1,517,083,412,359.55	12,242,683,000,000.00	12.39%
3	2015	1,028,798,509,739.42	11,017,068,904,744.60	9.34%
4	2016	1.441.554.469.770.67	7,989,359,000,000.00	18.04%
5	2017	1.695.886.958.784.33	8,834,897,375,000.00	19.20%
6	2018	1.646.255.134.945.00	10,870,432,071,874.00	15.14%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah mengalami tren meningkat. Proporsi selama periode tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan terdiri atas analisis sumber defisit riil dan analisis SiLPA. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Secara umum berikut adalah analisis terhadap pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

1. Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	11.631.697.051.829,90	11.287.300.941.021,00	9.464.926.705.876,01	7.987.877.780.773,00	8.154.749.005.918,47
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	13.780.244.907.476,00	11.274.631.837.034,30	10.205.342.292.212,00	7.601.242.338.859,40	8.239.379.709.093,14
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
A	Defisit riil	-2.148.547.855.646,10	-12.330.896.013,35	-790.415.586.335,99	386.635.441.913,60	-84.630.703.174,67
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	1.050.356.119.713,24	1.038.025.223.699,89	246.212.960.258,02	613.319.986.802,44	526.487.421.571,88

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL				
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	11.631.697.051.829	11.287.300.941.021	9.464.926.705.876	7,985,727,918,251	6,957,328,915,701
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	13.780.244.907.476,00	11.274.631.837.034,30	10,205,338,696,735	7,601,242,338,859	5,666,129,081,032
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
4	Defisit riil	-2.148.547.855.646,10	-12.330.896.013,35	-790,411,990,859	384,485,579,392	1,291,199,834,669

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2015	2016	2017
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	1,036,628,546,594	226,684,544,888	611,166,600,280
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0

Secara riil, kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 ketika APBD mengalami defisit. Penutup defisit itu, terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Kondisi berbeda pada tahun 2016 yaitu ketika terjadi surplus riil, maka penerimaan pembiayaan justru semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut.

2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Apabila diperlukan maka dapat melakukan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya. Analisis SiLPA digunakan untuk melihat sumber perolehan SiLPA dan proporsi kontribusi yang diberikan. Perolehan SiLPA selama tahun 2013-2017 sebagian besar diperoleh penghematan belanja yang tidak terserap. Hal tersebut mengidentifikasi dua hal yaitu efektifitas dalam penghematan anggaran atau belum optimalnya penganggaran belanja daerah.

**Tabel 3.14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

NO	URAIAN	2013		2014		2015		2016		2017		
		Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	1.050.356.119.713	100,00%	1.038.025.223.700	100,00%	246.212.960.258	100,00%	600.319.986.801	100,00%	-	1.123.738.108.106	100,00%
1	Pelampauan penerimaan PAD	341.645.425.583	32,53%	893.384.197.741	86,07%	-144.985.366.695	-58,89%	110.149.838.331	18,35%	-68.981.768.802	6,14%	
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-637.827.016.894	-60,72%	-800.677.641.912	-77,13%	-894.874.751.295	-	128.499.421.929	21,41%	-491.637.254.661	43,75%	
3	Pelampauan lain-lain pendapatan yang sah	-12217381500	-1,16%	2.267.504.905	0,22%	7.155.370.460	2,91%	-13.445.934.600	-2,24%	1.492.106.708	-0,13%	
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	1.358.755.092.524	129,36%	943.051.162.966	90,85%	1.278.917.707.788	519,44%	375.116.661.141	62,49%	-564.659.666.884	50,25%	
5	Pelampauan pembiayaan netto	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	48.475.533	0,00%	

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari, *pertama* strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan. Hal ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan *kedua*, pada komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk lima tahun mendatang. Dalam konteks makro, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan berbagai asas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan anggaran sebagai salah satu komponen penting dari pembangunan daerah dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, serta untuk menghindari adanya persoalan terkait pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran daerah. Berbagai asas tersebut adalah:

- Akuntabilitas, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan
- Profesionalitas, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah
- Proporsionalitas, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah
- Transparansi, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik
- Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri

**Tabel 3.15 Proyeksi Kerangka Pendanaan
Tahun 2019-2023**

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Pendapatan	10.549.624.013.250,00	11.534.474.227.000	12.147.101.010.000	13.246.220.487.000	14.201.152.017.500
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan	10.549.624.013.250,00	10.954.474.227.000,00	11.376.901.010.000,00	11.815.470.487.000,00	12.269.991.079.600,00
4	Belanja Tidak Langsung	6.526.656.978.075,00	5.411.102.979.307,11	5.412.061.767.073,62	5.616.897.372.290,36	5.775.758.664.747,42
5	Pengeluaran Pembiayaan	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

3.3.1. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberapa komponen tersebut:

1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- a. Komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - Optimalisasi pengelolaan aset kawasan ekonomi sebagai aset daerah.
 - Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui optimalisasi sistem retribusi dan pajak daerah.
 - Peninjauan kembali terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang dianggap sudah tidak sesuai baik dari sisi tarif maupun mekanisme pemungutan.
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola retribusi/pajak daerah.
 - Melakukan pendataan atas potensi pajak dan retribusi daerah guna mengukur kapasitas pajak dan retribusi daerah sebagai dasar dalam menetapkan target pendapatan.
 - Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, PD teknis penghasil, dan kecamatan.
 - Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan PD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru dari sumberdaya kawasan ekonomi yang belum diatur dalam peraturan perundangan.
- b. Meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMD dengan melakukan penataan manajemen yang mendorong BUMD dikelola secara profesional.

- c. Bagi Provinsi Kalimantan Timur, komponen pendapatan transfer menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait DBHBP Sumber Daya Alam. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dalam pengelolaan pendapatan transfer.
 - Upaya peningkatan jumlah DBHBP ketika terjadi penurunan melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
 - Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam.
 - Rasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Harmonisasi peraturan perundangan terkait investasi sektoral untuk Optimalisasi produktifitas kawasan ekonomi penyumbang terbesar PDRB Kaltim.
- d. Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang keduanya menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan, yaitu melalui:

- Strategi penganggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah

pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan.

- Selanjutnya penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan renstra OPD maupun perencanaan teknis setiap tahun dalam bentuk RKPD dan renja OPD
- Strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

Strategi di atas dijalankan melalui berbagai kebijakan belanja daerah yang berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah yang terdiri dari :

- a. Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
- b. Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
- c. Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.
- d. Kebijakan belanja operasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan
- e. Alokasi belanja operasi, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.

Tabel 3.15
Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	3.906.921.048.425	5.855.069.059.029	6.325.961.851.029	6.802.036.937.659	7.428.824.189.529
1	Prioritas I	3.309.189.730.304	5.018.612.696.589	5.409.359.250.099	5.905.380.955.803	6.500.411.128.328
2	Prioritas II	136.044.127.000	286.852.766.250	300.478.390.650	280.453.816.583	287.850.662.284
3	Prioritas III	461.687.191.121	549.603.596.190	616.124.210.280	616.202.165.273	640.562.398.917

3. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan yaitu penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun. Strategi lainnya adalah kerjasama pembiayaan pembangunan secara komplementer dan terpadu baik melalui Pinjaman (*Loan*), APBN, Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), APBD Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lainnya terutama untuk pelaksanaan program prioritas daerah.

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara akuntabel.

Komponen pendapatan daerah diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2019-2023 sebesar 3,84 persen. Proyeksi didasarkan pada perhitungan analisis data tahun 2013-2018 dan potensi pendapatan. Peningkatan pendapatan daerah

tersebut diupayakan berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah/OPD dalam menghasilkan PAD. Rasio PAD terhadap pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.

Komponen belanja daerah diproyeksikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan komponen wajib dan mengikat selama tahun 2013-2018 serta asumsi indikator makro yaitu inflasi. Komponen belanja daerah diproyeksikan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan riil daerah. Proyeksi ini didasarkan pada tren rata-rata pertumbuhan dan rata-rata proporsi komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Selain itu juga memperhatikan kemungkinan perkembangan perekonomian makro kedepan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada pendapatan daerah. Kondisi defisit memerlukan kewaspadaan karena besaran belanja yang melebihi kemampuan pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi lain dalam hal penutupan defisit belanja dari sisi penerimaan pembiayaan. Lebih rinci untuk melihat proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.16 Proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	PENDAPATAN	10.549.624.013.250	11.534.474.227.000	12.147.101.010.000	13.246.220.487.000	14.201.152.017.500
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5.452.964.353.550	6.362.974.720.000	6.860.538.503.000	7.808.866.980.000	8.381.004.510.500
1.1.1	Pajak Daerah	4.420.000.000.000	5.236.700.000.000	5.644.829.000.000	6.564.539.030.000	7.087.736.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	28.616.725.000	33.239.185.000	22.489.341.200	21.723.275.704	31.209.722.618
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	224.523.866.374	227.111.724.398	347.869.891.338	416.492.946.444	435.905.980.434
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	779.823.762.176	865.923.810.602	845.350.270.462	806.111.727.852	826.152.807.448
1.2	Dana perimbangan	5.059.832.628.500	5.159.079.507.000	5.273.955.507.000	5.424.555.507.000	5.807.155.507.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	3.038.477.121.500	3.137.724.000.000	3.252.600.000.000	3.403.200.000.000	3.785.800.000.000
1.2.2	Dana alokasi umum	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	36.827.031.200	12.420.000.000	12.607.000.000	12.798.000.000	12.992.000.000
1.3.1	Hibah	12.272.000.000	12.420.000.000	12.607.000.000	12.798.000.000	12.992.000.000
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	14.671.639.200	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.6	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	-
2	Belanja	10.669.670.000.000	10.954.729.575.358	11.375.391.191.052	11.812.206.212.789	12.265.794.931.360
2.1	Belanja Tidak Langsung	6.526.656.978.075	5.531.148.966.057	5.532.107.753.823	5.736.943.359.040	5.895.804.651.497
2.1.1	Belanja Pegawai	1.774.799.167.283	1.774.799.167.283	1.774.799.167.283	1.774.799.167.283	1.774.799.167.283
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	782.352.802.338	472.394.163.938	472.394.163.938	472.394.163.938	472.394.163.938
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2.579.253.034.454	2.629.135.098.086	2.730.093.885.852	2.834.929.491.069	2.943.790.783.526
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.355.477.424.000	620.045.986.750	520.045.986.750	620.045.986.750	670.045.986.750
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	4.143.013.021.925	5.423.580.609.301	5.843.283.437.228	6.075.262.853.748	6.369.990.279.862
2.2.1	Belanja Pegawai	292.637.422.329	293.637.422.329	294.637.422.329	295.637.422.329	296.637.422.329
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.419.924.279.524	3.692.339.610.300	4.103.854.420.344	4.327.609.878.891	4.614.077.227.242
2.2.3	Belanja Modal	1.430.451.320.072	1.437.603.576.672	1.444.791.594.555	1.452.015.552.528	1.459.275.630.291
3	Pembiayaan	120.045.986.750	120.045.986.750	120.045.986.750	120.045.986.750	120.045.986.750
3.1	Penerimaan Pembiayaan	220.045.986.750	220.045.986.750	220.045.986.750	220.045.986.750	220.045.986.750
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000

